

KEBIJAKAN STRATEGI MERDEKA BELAJAR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI ERA COVID - 19

Malikhatun Nafi'ah

STAIP, Indonesia

Ana Naila Miftahuz Zahro

STAIP, Indonesia

Heni kusmawati

STAIP, Indonesia

Email: ¹malikhatunnafiah90@gmail.com, ²naylaana63@gmail.com, ³kusmawati@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine and analyze the formulation of independent learning policies in the implementation of education during the Covid-19 pandemic through SWOT analysis. As we know, the Covid-19 outbreak limited the space for people to move around, especially the learning process at school. So that the existence of an independent learning policy can provide solutions to overcome the learning process during the Covid-19 pandemic. The research method used is a literature review approach with a qualitative descriptive method. The results of the study show that threats and weaknesses still dominate the existing strengths and opportunities, the availability of human resources, information technology facilities and support from government authorities still collide with the realities of the field in people who are still unable to master technology and budgets. obstacles in managing and supporting the successful implementation of self-learning policies. during the Covid-19 pandemic. With this article that examines the freedom of learning policy during the Covid-19 pandemic, it is hoped that there will be further research that goes directly to the field to get a more concrete picture to provide alternative solutions in improving subsequent government policies*

Keywords: *Free Learning Policy, Covid-19 Pandemic, Learning*

Abstrak. Pondok Pesantren MA Ma'ahid Kudus merupakan pondok pesantren yang memiliki konsep dengan memfokuskan terhadap Tahfidzul Qur'an, hal yang menjadi permasalahan di dalam program Tahfidz Al-Qur'an tersebut adalah dalam proses pembelajaran, terlihat dari belum sesuai metode yang digunakan dalam manajemen pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang Pondok Pesantren MA Ma'ahid Kudus, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil yang di capai dalam strategi pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang digunakan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa, pondok pesantren MA Ma'ahid Kudus merupakan Boarding School yang berbasis pada program tahfidzul Qur'an. Perencanaan dilakukan dengan empat tahapan seleksi, pengorganisasian dengan menentukan tugas dan mekanisme dalam proses pembelajaran, pelaksanaan ditandai dengan adanya proses belajar mengajar, pengawasan dengan melakukan pemantauan melihat buku setoran santri dan mengabsen santri, dan Keberhasilan yang diraih Pondok

Pesantren MA Ma'ahid Kudus dapat dilihat dari hasil prestasi dengan mengikuti perlombaan Tahfidz Al-Qur'an berbagai tingkatan dan kejuaraan.

Kata kunci: Kebijakan Merdeka Belajar, Pandemi Covid-19, Pembelajaran

LATAR BELAKANG

Selama revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 terjadi transformasi struktur sosial yang cepat dan berubah, hubungan sosial bergantung pada teknologi, beberapa kategori pekerjaan menghilang, warga negara memiliki kesempatan dan daya saing yang sama. Masa revolusi industri 4.0 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan aspek yang berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas melalui peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan yang bermutu dan kesesuaian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga menghasilkan sistem pendidikan berdaya saing global yang memiliki kemampuan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas diperlukan instrumen kebijakan sebagai dasar dan landasan hukum yang perlu diatur oleh negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa", sehingga secara konstitusional di Indonesia pendidikan menjadi tempat melahirkan generasi bangsa yang berkualitas yang harus benar-benar dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, pendidikan tidak lepas dari peran negara sebagai penyelenggara dan penyedia layanan, harus memiliki kebijakan pendidikan yang dapat dipahami dan dijadikan tolak ukur sebagai ketentuan dan peraturan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kebijakan sebagai aturan dasar dan acuan praktis dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah, oleh karena itu kebijakan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus dinilai, dianalisis, dinilai, dievaluasi sampai pada tahap pembangunan. Untuk memasuki era globalisasi dan internasionalisasi khususnya di bidang pengembangan iptek, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya pada acara Hari Guru Nasional (HGN) 2019 mengatakan konsep tersebut dicetuskan. tentang "Pendidikan Belajar Gratis". Konsep ini merupakan bagian dari lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan harus fleksibel menuju kebebasan dan keterbukaan diri sebagai lembaga pendidikan yang dapat berperan nyata dan

berkontribusi bagi kemaslahatan umat, khususnya di era revolusi industri 4.0. dan masyarakat 5.0.

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa konsep ini adalah kebebasan berpikir sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu sekolah harus adaptif dan futuristik. Karena sekolah merupakan wajah suatu bangsa, dimana perkembangan sistem pendidikan selalu menjadi acuan dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing yang tidak tertandingi karena perubahan keadaan, sehingga dalam pengelolaan sekolah diperlukan strategi pengembangan kurikulum. sesuai dengan tujuan pendidikan dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan kebijakan program belajar mandiri. Awal tahun 2020 merupakan awal yang cukup berat dengan adanya pandemi Covid-19, kasus Covid-19 tidak hanya melumpuhkan perekonomian suatu negara tetapi juga layanan pendidikan. Indonesia sebagai negara terdampak sedang melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kasus penularan Covid-19, khususnya di bidang pendidikan dengan melakukan pembelajaran daring. Kebijakan belajar mandiri memiliki peran besar dalam pelaksanaan pendidikan daring. Hal itu juga diperkuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Namun, setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat memastikan semuanya berjalan dengan lancar, apalagi di tengah wabah penyakit Covid-19, terutama masyarakat yang masih kekurangan akses terhadap layanan pendidikan berbasis digital. Dilema pendidikan berbasis daring semakin pelik ketika pemerintah mencanangkan kebijakan normal baru di tengah pandemi yang belum selesai, sehingga masyarakat, khususnya penyelenggara layanan pendidikan, dituntut untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kebijakan pendidikan yang ada dapat berfungsi secara efektif dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis daring di masa Pandemi Covid-19.

Untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid-19, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai evaluasi terkait kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Keluaran dari analisis ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan lingkungannya.

Matriks SWOT ini juga mampu menghasilkan analisis yang objektif berdasarkan situasi nyata yang dihadapi lembaga saat ini. Analisis SWOT yang akan digunakan dapat disajikan dengan matriks yang membagi faktor strategis dalam organisasi menjadi enam matriks, dua matriks utama adalah faktor internal yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan (SW) dan faktor eksternal yang terdiri dari Peluang.) dan Ancaman (OT) (Samsiah dan Dahlan, 2021).

Empat matriks berikutnya mengandung dampak silang jika kedua faktor utama ini disandingkan. Pertama, keunggulan komparatif merupakan kolaborasi antara kekuatan dan peluang yang ada, diperkuat dengan perencanaan yang matang. Kedua, mobilisasi juga merupakan kolaborasi antara kekuatan dan ancaman yang mungkin dihadapi di luar organisasi, pembuat kebijakan harus jeli dalam membaca situasi untuk menangkal ancaman dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Ketiga, investasi (divestasi investasi) merupakan kerjasama antara kelemahan dan peluang yang ada, diperlukan keputusan strategis dan perhitungan yang cermat untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul jika terpaksa sementara lemahnya sumber daya. Keempat pengendalian dampak kerusakan/kerugian (damage control) merupakan matrik terburuk yang harus dihadapi jika kelemahan yang dimiliki ditambah dengan ancaman yang ada di luar organisasi, dalam situasi ini pimpinan dan bawahan harus bekerja sama untuk mengendalikan situasi yang tidak menguntungkan tersebut agar tidak terjadi. tidak bertambah parah (Samsiah dan Dahlan, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan telaah kajian pustaka dengan metode kualitatif. Penelitian telaah kajian pustaka merupakan penelitian yang mengolah dan mengumpulkan bahan penelitian yang berupa data pustaka yang dapat diperoleh dari buku ataupun jurnal (Hatch, 2002). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data di berbagai media yang mengkaji teori yang berkaitan dengan merdeka belajar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Analisis Kebijakan

Kebijakan publik menyangkut isu dan masalah yang terjadi di masyarakat yang dikonstruksi dan diterjemahkan ke dalam keputusan, serta ditempatkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Retnoningsih dan Marom, 2017). Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah substansi kebijakan memuat informasi tentang masalah yang akan diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul akibat kebijakan yang diterapkan (Dunn, 2003). Analisis kebijakan merupakan prosedur berpikir yang telah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia.

Menurut Duncan MacRae (Dunn, 2003) “analisis kebijakan adalah sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta untuk menjelaskan, mengevaluasi, dan menghasilkan pemikiran dalam konteks upaya memecahkan masalah publik”. Suryadi dan Tilaar (1994) lebih jauh menekankan bahwa analisis kebijakan adalah suatu metode atau prosedur untuk menggunakan pemahaman manusia dan untuk memecahkan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan adalah penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok peneliti kebijakan dengan tujuan memperoleh berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan dengan suatu kebijakan (policy information) yang selanjutnya digunakan dalam merumuskan suatu kebijakan yang kompleks dan masalah publik yang kompleks menjadi lebih terstruktur (well-structured policy problem) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (alternatif kebijakan) untuk memecahkan suatu masalah kebijakan dan merekomendasikannya kepada pembuat kebijakan dan menjadikannya sebagai dasar informasi dalam proses pengambilan keputusan (Retnoningsih dan Marom, 2017).

2. Rumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan hal terpenting dalam proses pembuatan kebijakan publik berupa rangkaian keputusan untuk memecahkan masalah. Anderson mengatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan upaya untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, bagaimana alternatif pemecahan masalah yang berkembang dan siapa yang berpartisipasi. Sementara itu, pembentukan kebijakan lebih mengacu pada aspek-

aspek seperti bagaimana masalah publik menjadi perhatian pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirancang untuk masalah tertentu, dan bagaimana proposal tersebut diambil di antara alternatif-alternatif yang bersaing. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahapan dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan (Winarno, 2002).

3. Payung Hukum

Selama ini program presiden keempat ini masih belum memiliki landasan hukum yang baku, sehingga dalam prakteknya masih sering terjadi miskomunikasi antar sektor lembaga pendidikan. Landasan hukum yang digunakan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Sumber Anggaran

Dalam proses pelaksanaan kebijakan belajar mandiri pasti diperlukan anggaran, sumber dana anggaran pendidikan berasal dari masyarakat dan pemerintah. Karena kebijakan ini belum memiliki payung hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, sumber anggaran masih belum dialokasikan dengan baik dan sistematis sehingga sekolah sebagai pengguna kebijakan ini sering mengalami kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Apalagi, proses pelaksanaan kebijakan belajar mandiri bertepatan dengan kasus pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua lembaga pendidikan mampu beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi.

5. Desain Kebijakan

Secara keseluruhan kebijakan belajar mandiri merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, layanan pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat oleh ruang dan waktu, mengingat saat ini kita telah memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Maka menindaklanjuti arahan RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program utama dari kebijakan pendidikan "Kebebasan Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). semua layanan pendidikan harus berbasis teknologi, hal ini juga membantu dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 yang telah menjadi wabah dunia.

Kebijakan belajar mandiri dilaksanakan untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang sering terjadi berulang kali yang membatasi ruang gerak guru dan siswa untuk mengeksplorasi diri dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Pendidikan Belajar Gratis merupakan respon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kebutuhan sistem pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Tujuannya agar dalam sistem pendidikan khususnya bidang pembelajaran, peserta didik dapat menguasai literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. Sehingga pendidikan di Indonesia mampu mencetak generasi unggul yang mampu bersaing secara global.

6. Merdeka Belajar

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan saat ini dipandang tidak hanya sebagai sektor penyedia layanan publik (*public goods*), tetapi juga sebagai investasi produktif (*productive investment*) yang memacu pertumbuhan di berbagai bidang dan sektor pembangunan di Indonesia. Pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa dan negara, memiliki peran yang sangat strategis dan menjadi inisiator penentu kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, setiap pengelola pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan harapan semua pihak. Berangkat dari hal tersebut, diperlukan konsepsi, kebijakan, dan program pendidikan yang tepat, terarah, dan aplikatif.

Semangat untuk berinovasi dan berubah adalah semangat pertama dari program belajar mandiri yang akan dilaksanakan di sektor pendidikan Indonesia. Apalagi di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi (Ammas, 2021). Menurut Kemendikbud, belajar mandiri adalah memberikan kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan serta kemandirian dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit dan mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang disukainya (Tinggi, 2020). Konsep belajar mandiri digagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berpikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik mendalami bagaimana proses

pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengimplementasikan Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani di sekolah. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengedepankan keterbukaan dalam berpikir. Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan tercipta kemandirian belajar yang disebut sekolah mandiri.

Saat ini kebebasan pendidikan terletak pada gagasan humanisme baru (Marope, 2019). Esensi kebebasan berpikir menurut Nadiem, harus didahului guru sebelum mengajarkannya kepada siswa. Nadiem mengatakan, dalam kompetensi guru di level manapun, tanpa proses penerjemahan kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, pembelajaran tidak akan pernah ada. Dengan kebijakan belajar mandiri ini, Kemendikbud berharap penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran harus menyenangkan ditambah dengan pengembangan pemikiran inovatif oleh guru, hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam menyikapi pembelajaran. Belajar mandiri merupakan proses belajar yang wajar dalam mencapai kebebasan berpikir dan inovasi dalam pendidikan.

7. Matriks Analisis SWOT

a) Faktor internal

Kekuatan (*Strengthneses*)

- a. Memberikan perlindungan dan keselamatan siswa dalam proses pembelajaran di masa pandemic Covid- 19.
- b. Proses pembelajaran dapat diakses dan dilaksanakan tanpa terbebani oleh ruang dan waktu antara guru dan siswa.
- c. Kurikulum lebih fleksibel melalui Kepmendikbud Nomor 719 Tahun 2020.
- d. Dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait sarana pembelajaran yang mudah diakses melalui kerjasama Mendikbud dengan memberikan layanan informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud.

Kelemahan (*Weakness*)

- a. sebuah Sumber daya manusia yang masih minim keterampilan teknologi informasi selama pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.
- b. Siswa di pedesaan masih kesulitan mengakses pembelajaran daring karena keterbatasan fasilitas.
- c. Konektivitas jaringan antar wilayah yang berbeda sehingga akses pembelajaran sering tersendat.
- d. Terbatasnya interaksi/komunikasi antara siswa dan guru kurang optimal dalam proses pembelajaran.

b) Faktor Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

- a. sebuah proses pembelajaran berbasis daring merupakan hal baru di masa pandemi Covid-19.
- b. Pelaksanaan proses pendidikan lebih fleksibel. Pelaksanaan proses pendidikan lebih fleksibel.
- c. Sebuah kebijakan yang sangat solutif dan strategis di tengah pandemi Covid-19 dalam mencegah penularan.
- d. Meningkatkan kreativitas guru dalam memberikan materi yang menarik dalam proses pembelajaran.
- e. Tersedia berbagai informasi dan layanan pendidikan yang mendukung pelaksanaan kebijakan belajar mandiri di masa pandemi Covid-19.

Ancaman (*Treats*)

- a. Orang tua yang kesulitan mengalokasikan waktu untuk mendampingi anaknya belajar.
- b. Interaksi siswa dan guru yang terbatas memicu rendahnya pemahaman siswa dan menurunnya semangat belajar siswa.
- c. Tingkat kejenuhan yang berlarut-larut mempengaruhi kedisiplinan dan kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring.
- d. Lingkungan belajar siswa yang berbeda memicu tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran menjadi menurun dan tidak merata.
- e. Kebijakan belajar mandiri belum mampu memberikan solusi bagi daerah tertinggal, terutama keterbatasan akses layanan dan fasilitas belajar yang belum memadai dan optimal.

8. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Dari penjelasan matriks di atas dapat dipahami bahwa kebijakan belajar mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 masih merupakan hal yang baru bagi seluruh penyelenggara layanan pendidikan. Matrik analisis SWOT di atas juga menunjukkan bahwa ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih bertabrakan dengan kenyataan lapangan pada masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi. serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan belajar mandiri di masa pandemi Covid-19.

Di sisi lain, kebijakan belajar mandiri ini juga sangat membantu dalam mengatasi permasalahan pendidikan di tengah pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan ini secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada semua pihak baik siswa maupun guru untuk dapat melatih kemandirian dalam belajar. Mereka dapat dengan bebas mengeksplorasi materi dan materi pelajaran apa saja yang saling berkaitan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Serta meningkatkan layanan pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Melihat perkembangan dunia pendidikan yang memakan waktu hampir satu tahun di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan belajar mandiri untuk menjadi era baru dalam dunia pendidikan.

Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi harus mampu beradaptasi dengan situasi baru dalam proses pembelajaran di era belajar mandiri saat ini. Kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada merekonstruksi pendidikan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara tidak langsung melalui media online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Proses pembelajaran melalui media daring memberikan paradigma dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang, bereksplorasi, dan berpikir kritis dan kreatif secara mandiri dengan bimbingan dan bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Peserta didik membutuhkan bentuk pendidikan yang tepat agar mampu menyesuaikan kondisi pribadi dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pendidikan di era belajar mandiri.

METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang paling efektif. Pasca munculnya wabah Covid-19 di belahan bumi, sistem pendidikan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi, Surat Edaran no. 4 Tahun 2020 dari Mendikbud yang menganjurkan agar semua kegiatan di lembaga pendidikan harus menjaga jarak dan semua penyampaian materi disampaikan di rumah masing-masing.

1. *Project based learning*

Menurut Mendikbud, metode pembelajaran berbasis proyek sangat efektif bagi siswa dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangat cocok untuk siswa yang berada di zona kuning atau hijau. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya Anda juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

2. *Daring Method*

Untuk menyasati ketidakkondusifan dalam situasi seperti ini, cara online bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif dalam menghadapinya. Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masa pandemi ini.

Cara ini tampaknya mampu membuat siswa menggunakan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah atau melakukan segala aktivitas belajar melalui sistem online. Jadi, cara online ini sangat cocok untuk mahasiswa yang berada di zona merah. Dengan menggunakan metode full online seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berjalan dan semua siswa tetap berada di rumah masing-masing dalam kondisi aman.

3. *Luring Method*

Offline mengacu pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Cara ini sangat cocok untuk mahasiswa yang berada di zona kuning atau zona hijau, apalagi dengan protokol new normal yang ketat. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajarkan secara bergiliran (model shift) untuk

menghindari keramaian. Dikutip dari Kumparan, model pembelajaran luring ini disarankan Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum di masa darurat pandemi ini.

4. *Home visit method*

Seperti metode lainnya, home visit menjadi salah satu pilihan metode pembelajaran di masa pandemi ini. Metode ini mirip dengan kegiatan belajar mengajar yang disampaikan selama home schooling. Jadi, guru mengadakan kunjungan rumah ke rumah siswa selama waktu tertentu.

5. *Integrated curriculum*

Metode pembelajaran ini disampaikan anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki. Dikutip dari JPNN.com, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini mengatakan pembelajaran akan lebih efektif jika mengacu pada project base. Yang mana, setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Kurikulum terpadu dapat diterapkan untuk semua siswa di semua wilayah, karena metode ini akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem online. Sehingga penerapan kurikulum terpadu dinilai sangat aman bagi siswa.

6. *Blended learning*

Metode blended learning merupakan metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem online maupun tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun siswa dan guru belajar dari jarak jauh, mereka tetap dapat berinteraksi satu sama lain.

Mengingat wabah pandemi yang belum Anda ketahui secara pasti kapan berakhirnya, mungkin metode belajar ini bisa Anda jadikan pilihan bagi siswa Anda. Dengan cara-cara tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan lancar.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, kebijakan belajar mandiri dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 masih merupakan hal baru bagi seluruh penyelenggara layanan pendidikan. Dari analisis SWOT juga menunjukkan bahwa ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada,

ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih terbentur dengan kenyataan lapangan pada masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi. dan keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan belajar mandiri di masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, kebijakan belajar mandiri ini juga sangat membantu dalam mengatasi permasalahan pendidikan di tengah pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan ini secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada semua pihak baik siswa maupun guru untuk dapat melatih kemandirian dalam belajar. Mereka dapat dengan bebas mengeksplorasi materi dan materi pelajaran apa saja yang saling berkaitan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Serta meningkatkan layanan pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas.

Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan peserta didik atau siswa yang berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, serta berkarakter. Oleh karena itu, dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru adalah kunci keberhasilan sistem pendidikan belajar mandiri, oleh karena itu mereka harus mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan baru agar memiliki keterampilan dan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abidah, H. N. Hidayatullaah, R. M. Simamora, D. Fehabutar dan L. Mutakinati. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and its Relation to The Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1 (1), 38–49.
- A. Suryadi dan H. A. R. Tilaar. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- A. T. Daga. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7 (3), 1075–1090.
- A. Widiyono dan I. Millati. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2 (1), 1–9.
- A. Widiyono, S. Irfana dan K. Firdausia. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, 16 (2).
- B. Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- D. J. P. Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat

Journal of Student Research (JSR)

Vol.1, No.1 Januari 2023

e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 01-13

Jenderal

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ammas. (2021). Pembelajaran Daring Dalam Perspektif Merdeka Belajar. Jurnal Sipatokkong

Bpsdm Sulsel, 2 (1), 35–45.

S. Arifin, N. Abidin, dan F. Al Anshori. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap

Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, 7 (1), 65–78.